**PERAN PENGAWASAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH (DPRD)
KOTA PEKANBARU TERHADAP PERATURAN DAERAH KOTA
PEKANBARU NOMOR 14 TAHUN 2016 TENTANG
RETRIBUSI PARKIR DI TEPI JALAN UMUM**

Oleh : Try Rezky

Pembimbing 1 : Dr. Dessy Artina,SH.,MH.

Pembimbing 2 : Adi Tiara Putri,SH.,MH.

Alamat : Jl. Katio Ujung No 100 Pekanbaru

Email/Telepon : trirezky71@gmail.com / +62 896-0882-7504

Abstract

The Regional People's Representative Council (DPRD) is accountable to the regional government within the framework of running the cogs in the life of the regional government. What is provided by Law No. 23 of 2014 on regional government, article 149, explains that the Regional People's Council of the county/town (DPRD) has the function of drafting the regulations of the local government / City, budget and monitoring. In addition, the researcher wishes to examine the supervision of the Regional House of Representatives of Pekanbaru City (DPRD) on regional regulations, specifically the 2016 Pekanbaru District 14 regulation on remuneration for parking at the edge of the roads. public road. It can be seen that the parking fee is one of the principal area revenues (PAD) in Pekanbaru city and will be included in the Pekanbaru city budget. The reality is that the initial area revenue (PAD) from parking fees in Pekanbaru town has yet to hit the target. You can see that in 2021, the parking fee in Pekanbaru city as of August 2021 will only reach IDR 2 billion with a target of IDR 8 billion and IDR 9 billion. Moreover, in 2020, the parking fee will only reach IDR 3 billion. with a target of IDR 9 billion. . Then in 2019, the implementation of the parking tax only reached Rp 5 billion with a target of Rp 11 billion. According to the assessment of the past three years, the payment for parking in the city of Pekanbaru n 'n' has never met its goal.

In this case, oversight by the relevant authorities is required, such as the supervisory function of the Pekanbaru Municipal House of Representatives (DPRD) which directly oversees the regional status of Pekanbaru City No. 14 2016 regarding payment for parking at the edge of a public road. This research is either experimental legal research or sociological legal research. Experimental legal research is done by determining the law and how it is effectively applied in society, because in this study the author has directly studied the place or place under study , specifically This could be the Pekanbaru City Regional Representative House (DPRD) in Commission IV and the Pekanbaru City Parking Lot Engineering Service Unit (UPTD).

From the results of the study carried out, it can be concluded that the performance of the supervisory function of the Pekanbaru City Regional People's Representative Council (DPRD) regarding the 14th district regulation of Pekanbaru city in 2016 regarding the payment for parking along public roads has not yet performed the supervisory function of the Regional People's Representative Council (DPRD). therefore it is considered that the supervision by the Regional People's Representative Council (DPRD) is ineffective and not up to expectations, with the parking problem in Pekanbaru town still unresolved and efforts to increase Income of regional initiatives carried out by 4,444 engineering service delivery units (UPTD) has not yet achieved satisfactory results. No attempt has been made to review and evaluate the performance of the Service Engineering Execution Unit (UPTD) in performing its field tasks in achieving the initial revenue of the Service Engineering Unit (UPTD). city from Pekanbaru.

Keywords: Supervision – Regional People's Representative Council (DPRD) – Regional Original Revenue (PAD)

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah negara kesatuan, hal itu lebih tegas tertuang dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945, yang menyatakan bahwa : “ Negara Indonesia ialah negara kesatuan, yang berbentuk Republik.” Karena wilayah Indonesia yang begitu luas, maka dalam menjalankan pemerintahan tidak mungkin diatur dan diurus sendiri oleh pemerintah pusat, oleh karena itu harus ada pelimpahan wewenang dalam menjalankan pemerintahan, seperti yang terurai dalam Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan :”Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dalam Undang-Undang.” Sedangkan Undang-Undang yang mengatur tentang pemerintah daerah adalah Undang-Undang 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.¹

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) merupakan unsur Pemerintahan Daerah yang tatanan susunannya mencerminkan sebagai perwakilan seluruh rakyat di daerah-daerah yang ada di Negara Inonesia. Bersama-sama dengan Kepala Daerah melaksanakan tugas, kewenangan Pemerintah serta Daerah yang disebut dengan bidang legislatif. Sebagai unsur Pemerintahan Daerah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) mempunyai kedudukan sesuai atau yang setingkat dengan Kepala Daerah. Kedudukan serta Tugas dan Fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur lembaga Pemerintahan Daerah. Sebagai unsur lembaga Pemerintahan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah memiliki tanggungjawab yang besar serta sama dengan Pemerintah Daerah dalam rangka menjalankan roda-roda didalam kehidupan

Pemerintahan Daerah, bertentangan dengan kesejahteraan hewan Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah pasal 149, Dewan Perwakilan Rakyat (DPRD) terdiri dari atas anggota partai politik peserta pemilihan umum yang dipilih melalui pemilihan umum.

Pada poin C dijelaskan pada Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah pasal 153², mengenai pengawasan yang dilakukan DPRD Kabupaten/Kota diwujudkan dalam bentuk pengawasan terhadap :

- a. Pelaksanaan Perda Kabupaten/Kota dan peraturan bupati/wali kota;
- b. Pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang terkait dengan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota; dan
- c. Pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan laporan keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan.

Sesuai dengan hal di atas berkenaan dengan Pemerintahan Daerah, tugas dan wewenang Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dapat dilihat bahwa pada pasal 366 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah pada poin C menyebutkan melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan daerah anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten/Kota. Maka dalam hal ini penulis ingin mengkaji terkait dengan salah satu Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Retribusi Parkir Di Tepi Jalan Umum. Bagaimana fungsi pengawasan Dewan Perwakilan Daerah (DPRD) Kota Pekanbaru terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah tersebut.

Dengan adanya otonomi, pembiayaan tidak hanya berasal dari pusat saja melainkan juga berasal dari daerahnya sendiri sehingga masing-masing Pemerintah daerah berusaha meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) nya masing masing. . Sementara dalam penjelasan Undang-Undang

¹ Lihat pada pasal 18 Undang-undang Dasar 1945

² Lihat pasal 153 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014

Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah dan pemerintah daerah pada pasal 8³, menyatakan bahwa “Pendapatan Asli Daerah adalah penerimaan yang diperoleh dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah (Perda) sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku”. Kebijakan publik dalam bentuk undang-undang dan peraturan daerah (Perda) ada jenis kebijakan publik yang memerlukan kebijakan publik penjelas yaitu yang sering diistilahkan sebagai peraturan pelaksana.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah pada Pasal 6 ayat 1 huruf B disebutkan bahwa Pendapatan Asli Daerah bersumber dari retribusi daerah.⁴ Sementara berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah pada pasal 127 huruf E disebutkan bahwa jenis retribusi jasa usaha adalah retribusi khusus parkir.⁵

Dibentuknya Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Retribusi Parkir Di Tepi Jalan Umum diharapkan mampu menjawab persoalan perparkiran di kota Pekanbaru.

Dalam Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum, Pasal 18 mengatur mengenai pembinaan dan pengawasan yang antara lain sebagai berikut :

1. Pembinaan dan pengawasan pengelolaan parkir dilakukan oleh dinas melalui UPTD parkir
2. Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk
3. Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk

³ Lihat pasal 8 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004

⁴ Lihat pasal Pasal 6 ayat 1 huruf B Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004

⁵ Lihat pasal 127 huruf E Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009

Untuk melaksanakan kewenangan Provinsi di Daerah Kabupaten/Kota, Unit Pelaksana Teknik Dinas (UPTD) parkir bagian dari Instansi Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru yang bertanggung jawab terhadap permasalahan lalu lintas.

Perlu mensiasati bagaimana mengkombinasikan antara Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan manajemen lalu lintas sehingga kedua tujuan tersebut tercapai. Akan tetapi terkait hal tersebut di atas masih belum teratasinya permasalahan perparkira di kota Pekanbaru. Masalah lainnya yakni menyangkut Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari retribusi parkir di kota Pekanbaru yang belum mencapai target. Dapat lihat pada tahun 2021 ini, realisasi retribusi parkir di Kota Pekanbaru sejak Agustus 2021 realisasinya hanya mencapai Rp 2 Miliar dengan target seharusnya Rp 8 Miliar- Rp 9 Miliar ujar Kepala Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru Yuliarso, Jumat (20/8).⁶ Selanjutnya pada tahun 2020 realisasi retribusi parkir hanya mencapai Rp 3 Miliar dengan target seharusnya Rp 9 Miliar ujar Kepala Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru Yuliarso.⁷ Lalu pada tahun 2019 realisasi retribusi parkir hanya mencapai Rp 5 Miliar dengan target seharusnya Rp 11 Miliar.⁸ Dilihat dari tiga tahun belakangan, retribusi parkir di Kota Pekanbaru tidak pernah tercapai pada targetnya. Dapat diketahui retribusi parkir sangat penting untuk menambah kedalam Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota Pekanbaru.

Sesuai dengan hal di atas berkenaan dengan Pemerintahan Daerah, tugas dan wewenang Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dapat dilihat bahwa pada pasal 366 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah pada poin C menyebutkan melaksanakan

⁶<https://www.pekanbaru.go.id/p/news/realisasi-retribusi-parkir-capai-rp2-miliar>, diakses pada 02 Oktober 2021

⁷<https://www.pekanbaru.go.id/p/news/realisasi-pad-parkir-capai-rp3-miliar>, diakses pada 02 Oktober 2021

⁸<https://www.idnjurnal.com/news/detail/6069/dishub-pekanbaru-kejar-target-pad-retribusi-parkir-begini-caranya>, diakses pada 02 Oktober 2021

pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan daerah anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten/Kota. Maka dalam hal ini penulis ingin mengkaji terkait dengan salah satu Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Retribusi Parkir Di Tepi Jalan Umum. Bagaimana fungsi pengawasan Dewan Perwakilan Daerah (DPRD) Kota Pekanbaru terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah tersebut yang terdapat banyak adanya permasalahan dengan judul penelitian “ Peran Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pekanbaru Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pelaksanaan peran pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Pekanbaru terhadap Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 14 Tahun 2016 tentang Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum ?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui Peran Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Pekanbaru terhadap Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum.
- b. Untuk mengetahui upaya meningkatkan peran pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Pekanbaru Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Secara Teoritis
Penelitian ini berguna bagi penulis sebagai syarat dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum Strata Satu (S1) di Fakultas Hukum Universitas Riau. Dan Penelitian ini diharapkan dapat memberikan

tambahan pengetahuan di bidang Hukum Tata Negara.

b. Secara Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan bahan masukan dan saran pemikiran kepada pihak penegak hukum khususnya bagi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Pekanbaru dan Unit Pelaksana Teknik Dinas (UPTD)

D. Kerangka Teori

1. Teori Pengawasan

Untuk tidak menimbulkan salah penafsiran terhadap judul penelitian ini, serta Di dalam negara demokrasi, menurut La Ode Husen⁹ menyebutkan bahwa di Belanda pengawasan didefinisikan” *as being informed about, cheking, juding and possibly redressing the way in wich a competence has been or will be made use of* (pemberian informasi, pemeriksaan, menilai, dan mungkin cara memperbaiki sesuai dengan kewenangan). Pengawasan dapat di artikan sebagai suatu tindakan untuk mencegah agar sesuatu perbuatan/ keputusan organisasi/ pejabat pemerintah tidak merugikan masyarakat dan bertentangan dengan aturan yang ada. Pengawasan ini sangat di perlukan agar perbuatan pejabat publik (pejabat pemerintah) benar-benar sesuai dengan kebutuhan, kemanfaatan dan sesuai dengan hukum yang berlaku, sehingga bisa mengurangi tindakan otoriter dan penyalahgunaan wewenang dari pejabat pemerintah. Bahkan pengawasan merupakan ciri kehidupan bermasyarakat dan bernegara yang demokratis. Keterkaitan antara negara hukum dengan pengawasan semakin jelas karena keberadaan sarana kontrol atas tindakan penguasa/pemerintah

⁹ H.La Ode Husen, *Hubungan Fungsi Pengawasan DPR dengan Badan Pemeriksa Keuangan Dalam sistem ketatanegaraan Indonesia*. Cv. Utomo: Bandung 2005 hlm 94

menjadi elemen pokok dalam konsepsi negara hukum.

2. Teori Kewenangan

Kewenangan memiliki kedudukan penting dalam kajian hukum tata Negara dan hukum administrasi. Begitu pentingnya kedudukan kewenangan ini sehingga F.A.M Sroink J.G Steenbeek menyebutkan sebagai konsep inti dalam kedudukan tata negara dan hukum administrasi.¹⁰ Sebagai penciptaan bahan yang terpisah (*bodies separated*) oleh aturan hukum (undang-undang) dari pemerintah pusat, di mana pemerintah (perwakilan) local diberi kekuasaan formal untuk memutuskan ruang lingkup persoalan publik. Untuk mengatur roda pemerintahan “Kekuasaan” dan Wewenang adalah dianggap penting. Dalam ilmu Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi istilah “kekuasaan” dan “wewenang” terkait erat dengan pelaksanaan fungsi pemerintah.¹¹ E. Utrech membedakan istilah “kekuasaan” (*gezag authority*) dan “kekuatan” (*macth. power*). Dikatakan kekuatan merupakan istilah politik yang berarti.¹² Sebagai bagian dari rangkaian reformasi, penataan sistem kelembangaan negara pun dilaksanakan, penataan tersebut dilakukan melalui perubahan fungsi dan wewenang.¹³

E. Kerangka Konseptual

Untuk tidak menimbulkan salah penafsiran terhadap judul penelitian ini, serta sebagai pijakan penulis dalam menyelesaikan penulisan ini, maka

penulis memberikan definisi-definisi atau batasan-batasan terhadap istilah-istilah yang digunakan, yakni sebagai berikut

1. Pengawasan adalah tindakan aparaturnya pemerintahan diperlukan agar pelaksanaan tugas yang telah ditetapkan dapat mencapai tujuan dan terhindar dari penyimpangan-penyimpangan.¹⁴
2. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan daerah.¹⁵
3. Peraturan Daerah adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh DPRD provinsi dan/ atau daerah kabupaten/kota dengan persetujuan bersama kepala daerah.¹⁶
4. Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih yang diperoleh dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan serta lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.¹⁷
5. UPTD adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas yang merupakan pelaksana sebagian kegiatan teknis operasional dan kegiatan teknis penunjang.
6. Kewenangan adalah hak untuk melakukan sesuatu atau memerintah orang lain untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu agar tercapai tujuan tertentu.¹⁸

¹⁰ Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*. UII Press, Yogyakarta, 2002

¹¹ Anton M. Moeliono, dkk, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1995, hlm 533

¹² Utrecht, E., *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*, NV Bali Buku Indonesia, Jakarta, 1995 hlm 533.

¹³ Dessy Artina, Legal Standing Lembaga Negara dalam Sengketa Antar Lembaga Negara yang Kewenangannya Diberikan Undang-Undang Dasar, *Jurnal Konstitusi, Unri*, Pekanbaru, 2012, hlm 82

¹⁴ Saiful Anwar, *Sendi-Sendi Hukum Administrasi Negara*, Ghalian Indonesia, Jakarta, 2005, hlm 80.

¹⁵ Gunawan Markus, SH, Mkn, *Buku Pintar Calon Anggota dan Anggota Legislatif (dpr, dpd & DPRD)*, Trans Media, Jakarta, 2008, hlm 77.

¹⁶ Pasal 1 angka 8 Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

¹⁷ Lihat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014

¹⁸ Sumber : Kamus Bahasa Indonesia

7. Retribusi adalah pungutan yang harus dibayarkan oleh pengguna fasilitas kepada pemilik atau pengelola sebagai syarat menggunakan fasilitas tersebut.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian hukum yang digunakan dalam penulisan adalah jenis penelitian yuridis sosiologis. karena penelitian hukum ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan masalah yang diteliti dengan sifat hukum yang nyata dan sesuai dengan kenyataan hidup di dalam masyarakat. penelitian jenis ini dapat mengungkapkan permasalahan-permasalahan yang ada di balik pelaksanaan dan penegakan hukum.¹⁹

2. Lokasi Penelitian

Lokasi Penelitian yang penulis ambil adalah wilayah hukum Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Pekanbaru dan Unit Pelaksana Teknik Dinas (UPTD) Parkir Pekanbaru.

3. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi adalah sekumpulan objek yang hendak diteliti berdasarkan lokasi penelitian yang telah di tentukan sebelumnya sehubungan dengan penelitian ini.²⁰ Adapun yang dijadikan populasi dalam sampel ini adalah sebagai berikut

1. Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pekanbaru
2. Koordinator UPTD parkir Dinas Perhubungan Pekanbaru
3. Juru Parkir

b.

c. Sampel

Untuk mempermudah penelitian ini, maka peneliti menentukan sampel. Sampel merupakan himpunan atau bagian populasi yang dapat mewakili keseluruhan objek penelitian yang mempermudah peneliti dalam melakukan penelitian.²¹

Yang akan menjadi sampel dalam penelitian ini adalah :

Populasi dan Sampel

No	Responden	Populasi	Sampel	Persen %
1.	Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Kota Pekanbaru	12	1	8,3%
2.	Koordinator UPTD Dinas Perhubungan Pekanbaru	5	1	20%
3.	Juru Parkir	1.080	30	2,7%
Jumlah		1.097	32	-

Sumber : Data Primer Olahan Tahun 2021

4. Sumber Data

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung oleh peneliti melalui responden dengan cara wawancara di lapangan mengenai hal-hal yang bersangkutan dengan narasumber Anggota Komisi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Kota Pekanbaru) , Koordinator Unit Pelaksana Teknik Dinas (UPTD), Juru Parkir.

b. Data Sekunder

1. **Bahan Hukum Primer**, berupa peraturan perundang-undangan yang meliputi:

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.
- b. Undang-Undang Dasar 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.

¹⁹Amiruddin, dan H. Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo, Jakarta: 2012, Hlm. 134

²⁰Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta: 2002, Hlm.44.

²¹Bambang Sugono, *Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo, Jakarta:2005, Hlm.119

- c. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Peraturan Perundangan.

2. Bahan Hukum Sekunder

Yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan bahan hukum primer.²² Berupa buku-buku literatur hukum dan pendapat hukum dalam literatur, website, jurnal ilmiah, dokumen yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.

3. Bahan Hukum Tersier

Yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.²³

5. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Wawancara yang dilakukan oleh penulis langsung untuk mengajukan pertanyaan seputar masalah penelitian kepada responden yaitu dengan pihak terkait yaitu permasalahan peran pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Pekanbaru Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum.

b. Kajian Kepustakaan

Data studi dokumen atau bahan kepustakaan yang juga disebut sebagai data sekunder terutama dapat diperoleh dari perpustakaan. Maksudnya bahwa dalam penelitian ini akan dikumpulkan data-data kepustakaan yang dikumpulkan dengan cara membaca dan memahami,

selanjutnya dilakukan teknik pencatatan dengan mengutip teori dan penjelasan yang penting dari bahan-bahan yang relevan dengan pokok permasalahan dalam penelitian ini.

6. Analisis Data

Dalam penelitian ini data yang dikumpulkan dianalisa secara kualitatif yang dimaksudkan sebagai data yang berdasarkan uraian kalimat atau data tidak dianalisa dengan menggunakan statistik atau matematika ataupun yang sejenisnya, dinyatakan secara tertulis atau lisan dan perilaku nyata atau yang diteliti maupun dipelajari sebagai suatu yang utuh. Dari pembahasan di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa deduktif yaitu penarikan kesimpulan dari yang bersifat umum ke khusus.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)

Pengertian atas kata pengawasan yang telah ada dalam perbendaharaan kata Kata Bahasa Indonesia, disimpulkan oleh Poer-wadarminta dalam Bahasa Indonesia, pengawasan adalah suatu bentuk pemeriksaan atau pengontrolan dari pihak yang lebih atas kepada pihak dibawahnya. Bertolak dari pandangan tentang pengertian pengawasan yang dikemukakan di atas, maka pengertian lain nya tentang pengawasan, yaitu suatu upaya agar apa yang telah direncanakan sebelumnya diwujudkan dalam waktu yang telah ditentukan serta untuk mengetahui kelemahan-kelemahan dari kesulitan dalam pelaksanaan tadi, sehingga berdasarkan pengamatan-pengamatan tersebut dapat diambil suatu tindakan untuk memperbaikinya, demi tercapainya wujud semula.²⁴

Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) terhadap

²²Ashafa, *Metode Penelitian Hukum*, PT.Rineka Cipta, Jakarta: 1996. Hlm. 103

²³Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif*, Rajawali Pers, Jakarta:2010,Hlm. 33.

²⁴Hidayat, *Sekilas Tentang Pengawasan*, Majalah Keuangan, hlm 23

peraturan daerah merupakan salah satu ruang lingkup dari fungsi pengawasan yang melekat pada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Bagi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Pekanbaru dasar hukum yang menyebutkan tentang fungsi pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) termuat dalam keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Pekanbaru Nomor 01 Tahun 2010 tentang tata tertib Dewan Perwakilan Daerah (DPRD) pada pasal 2 ayat (1) disebutkan bahwa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) memiliki fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan, serta pada ayat (4) disebutkan bahwa fungsi pengawasan sebagaimana yang dimaksud ayat (1) diwujudkan dalam bentuk pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan daerah dan APBD.

Dari sekian banyak jenis hubungan dan wewenang antara DPRD dengan Kepala Daerah tersebut diatur dalam peraturan perundang-undangan, sehingga terlihat bahwa Kepala Daerah bukan merupakan penguasa tunggal di daerah, karena penyelenggara pemerintah daerah adalah Kepala Daerah dan DPRD, hal ini diharapkan agar tercipta iklim demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, kemudian terjadi check and balance, gambaran tersebut dapat diklarifikasikan menjadi tiga jenis hubungan, yaitu hubungan kemitraan (partnership), hubungan pengawasan (controlling), dan hubungan anggaran (budgeting), seperti halnya hubungan antara DPR dengan Presiden pada Pemerintah Pusat.²⁵

Tujuan utama pengawasan adalah untuk memahami apa yang salah demi perbaikan dimasa datang, dan mengarahkan seluruh kegiatan-kegiatan dalam rangka pelaksanaan dari pada suatu rencana sehingga dapat diharapkan suatu hasil yang maksimal.²⁶ Tidak bisa

²⁵ I Gde Panca Astawa, *Jurnal Problematika Hukum Otonomi Daerah di Indonesia*, Alumni, Bandung, 2008, hlm. 112

²⁶ Diterbitkan oleh Sekretariat Wakil Presiden RI, Suplemen atas Pedoman Tentang Penyebaran Pengertian dan Kesadaran Pengawasan, hlm 3

sangsikan lagi bahwa banyaknya lembaga pengawasan di Negara RI menimbulkan kesan sebagai upaya pengepungan setiap kemungkinan penyelewengan dari setiap birokrasi.²⁷

B. Tinjauan Umum Pemerintah Daerah

Pemerintah daerah adalah pelaksana fungsi-fungsi pemerintahan yang dilakukan oleh Lembaga pemerintah daerah dan DPR.²⁸ Konsepsi pemerintahan daerah yang diatur di dalam Undang-Undang Dasar 1945 hanya mengatur hal hal yang sifatnya pokok-pokok saja.²⁹ Oleh karena itu, pemerintah Bersama Dewan Perwakilan Daerah (DPR) membentuk Undang-Undang tentang pemerintah daerah untuk mengatur segala rinci hal yang berkaitan dengan pemerintah daerah. Pengertian pemerintah daerah menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah otonomi untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.³⁰

Fungsi pemerintah daerah dapat diartikan sebagai perangkat daerah menjalankan, mengatur dan menyelenggarakan jalannya pemerintahan. Fungsi pemerintah daerah menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 adalah:³¹

- a. Pemerintah daerah mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan, menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.
- b. Menjalankan otonomi seluas luasnya kecuali urusan pemerintahan yang menjadi urusan pemerintahan dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan

²⁷ Syahrir, *Pengamanan Dana dan Daya Negara*, Prisma, hlm 17.

²⁸ Ini Kencana Syafi' *Sistem Pemerintahan Indonesia*, Rineke Cipta, Jakarta: 1999, hlm 7

²⁹ Dahlan Thaib, *Teori dan Hukum Konstitusi*, Rajawali pers, Bandung: 1999, hlm 16

³⁰ Lihat pasal 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014

³¹ Lihat Pasal 76 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014

masyarakat, layanan umum dan daya saing daerah.

Hak dan kewajiban daerah tersebut di wujudkan dalam bentuk rencana kerja pemerintahan daerah dan dijabarkan dalam bentuk pendapatan, belanja, dan pembiayaan daerah, yang dikelola dalam sistem pengelolaan keuangan daerah. Sesuai dengan asas-asas yang telah di kemukakan diatas pengelolaan keuangan dilakukan secara efisien transparan, bertanggung jawab, tertib, adil, patuh, dan taat pada peraturan perundang-undangan.³²

C. Tinjauan Umum Peraturan Daerah

Peraturan daerah merupakan salah satu jenis peraturan perundang-undangan dan bagian dari sistem hukum nasional yang berdasarkan Pancasila. Pada saat ini peraturan daerah mempunyai kedudukan yang sangat strategis karena diberikan landasan konstitonal sebagai mana di atur dalam pasal 18 ayat 6 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945.

Perwakilan Daerah (DPR) membentuk Undang-Undang tentang pemerintah daerah untuk mengatur segala rinci hal yang berkaitan dengan pemerintah daerah. Pengertian pemerintah daerah menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah otonomi untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.³³

Fungsi pemerintah daerah dapat diartikan sebagai perangkat daerah menjalankan, mengatur dan menyelenggarakan jalannya pemerintahan. Fungsi pemerintah daerah menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 adalah :³⁴

³² Rozali Abdullah, *Pelaksanaan Otonomi Luas Dengan Pemerintah Kepala Daerah Secara Langsung*, Jakarta, 2007, hlm 27-30.

³³ Lihat pasal 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014

³⁴ Lihat Pasal 76 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014

BAB III GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Gambaran Umum Kota Pekanbaru

Kota Pekanbaru merupakan ibu kota Provinsi Riau. Pekanbaru dikenal dengan sebutan kota bertuah yang merupakan singkatan dari Bersih, Tertib, Usaha Bersama, Aman dan Harmonis yang merupakan slogan ibu kota bumi malayu lancang kuning dalam mencapai tatanan kota yang lebih baik. Pekanbaru yang dikenal sebagai Kota Melayu, karena Pekanbaru merupakan garda utama di Provinsi Riau khususnya dan di Indonesia pada umumnya dalam hal menjaga dan melestarikan kebudayaan melayu yang menjadi visinya 2021. Pekanbaru mempunyai dua pelabuhan di sungai siak, yaitu pelabuhan Pelita Pantai dan Pelabuhan Sungai Duku, Terminal Bandar Raya Payung Sekaki serta satu Bandar Udara yaitu Bandara Sultan Syarif Kasim II.

B. Gambaran Umum Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Pekanbaru.

Sejarah parlemen di Indonesia dimulai pada masa pemerintahan hindia yang dinamai dengan *Volksraad* (Dewan rakyat) yang bekerja dari tahun 1918 hingga 1942 saat Jepang masuk ke Indonesia. Keseluruhan anggota *Volksraad* diangkat oleh pemerintah hindia belanda yang waktu itu gubernur jendralnya dijabat oleh Mr Graaf Van Limburg Stirum. Kaum nasionalime moderat seperti ; Moh Husni Thamrin dan Soetardjo Kartohadikoesumo bersedia menggunakan dan mensiasati *Volksraad* sebagai jalan untuk mencapai cita-cita Indonesia mendeka melalui jalan parlemen .³⁵

³⁵ B.N Marbun, *DPR: Pertumbuhan dan cara Kerjanya*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta: 1992, hal 19

C. Gambaran Umum Tentang Unit Pelaksana Teknik Dinas (UPTD) parkir Kota Pekanbaru

Perparkiran merupakan salah satu komponen atau aspek yang tidak bisa terpisahkan dalam kebutuhan sistem transportasi di Indonesia, Karna setiap perjalanan dengan kendaraan pribadi selalu dimulai dan diakhiri di tempat parkir. Pada dasarnya parkir adalah kebutuhan umum yang awalnya berfungsi melayani. Sesuai dengan fungsi tersebut, ruang parkir disesuaikan dengan permintaan seiring dengan kebutuhan orang yang berkendara untuk berada untuk mengakses suatu tempat.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Peran Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Pekanbaru terhadap Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum

Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, posisi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Pekanbaru ditempatkan pada posisi yang sangat strategis dan menentukan dalam pelaksanaan otonomi daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Pekanbaru merupakan lembaga perwakilan rakyat daerah dan berkedudukan sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah yang memiliki fungsi legislasi, anggaran dan pengawasan.

Mengenai hal-hal dalam bidang legislatif wewenang itu dijalankan oleh badan-badan perundang-undangan, yaitu Pemerintah bersama DPR (pembentuk undang-undang). Pemerintah atas dasar Pasal 5 ayat 2 atau Pasal 22 UUD dan mungkin juga seorang Menteri atas dasar delegasi kekuasaan perundang-undangan. Mengenai hal-hal yang terletak dalam bidang eksekutif wewenang negara itu

dijalankan oleh Presiden(pemerintah) atau Menteri.³⁶

Fungsi pengawasan peraturan daerah sangatlah penting yang memberikan kesempatan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Pekanbaru untuk lebih aktif dan kreatif menyikapi berbagai kendala terhadap pelaksanaan peraturan daerah. Melalui pengawasan dewan, eksekutif sebagai pelaksana kebijakan akan terhindar dari berbagai penyimpangan dan penyelewengan, dari hasil pengawasan dewan akan diambil tindakan penyempurnaan memperbaiki pelaksanaan kebijakan tersebut.

Sebagai bagian dari rangkaian reformasi, penataan sistem kelembagaan negara pun dilaksanakan, penataan tersebut dilakukan melalui perubahan fungsi dan wewenang.³⁷

Setiap komisi akan melakukan pengawasan terhadap peraturan daerah yang berada pada ranah tugas dan wewenang bidanya masing-masing. Sebagaimana yang telah dijelaskan dalam hal pengawasan yang dilakukan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Pekanbaru terhadap peraturan daerah, terdapat dua aspek yang termuat di dalamnya. Pertama, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) mengawasi keefektifan dari pelaksanaan peraturan daerah itu sendiri sebagaimana sebuah kebijakan maupun produk hukum bersifat pengaturan yang mengawasi lembaga/instansi yang terkait atas suatu peraturan daerah. Oleh karena itu tindak lanjut hasil pengawasan yang dilakukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

³⁶ Mexasai Indra, "Politik Hukum Pertanahan Sebelum dan Sesudah Berlakunya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960(1960),"Jurnal Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Riau, Edisi 1,No.1 Agustus 2010,hlm. 45.

³⁷ Dessy Artina, Legal Standing Lembaga Negara dalam Sengketa Antar Lembaga Negara yang Kewenangannya Diberikan Undang-Undang Dasar, *Jurnal Konstitusi*, Unri, Pekanbaru, 2012, hlm 82

(DPRD) Kota Pekanbaru akan berujung pada dua aspek tersebut yang dapat berupa perbaikan regulasi yang ada maupun penyempurnaan kebijakan maupun penyempurnaan kebijakan yang telah dihasilkan dan pencegahan tindak penyelewengan wewenang yang dilakukan oleh aparaturnya pelaksana peraturan daerah.

Mengingat sektor parkir memang sangat potensial untuk menjadi salah satu penyumbang Pendapatan Asli Daerah (PAD) agar tercapainya Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Pekanbaru yang akan menambah kas daerah untuk APBD Kota Pekanbaru. Namun jika tidak dilakukan tata kelola yang baik, justru permasalahan parkir tidak akan terurai dengan baik dan akan terus menjadi permasalahan klasik. Masalah ini perlu mendapatkan perhatian yang serius terkait dengan perparkiran. Apabila masalah parkir di biarkan terus menerus akan mengakibatkan dampak yang sangat kompleks dan sukar untuk diatasi masalah perparkiran yang ada di Kota Pekanbaru tersebut. Hal ini perlu ditinjau fungsi pengawasan terhadap implementasi Peraturan Daerah tersebut.

Terkait dengan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 14 Tahun 2014 Tentang retribusi parkir di tepi jalan umum masih dapat kita lihat bahwa implementasi dari Perda tersebut dinilai sangat memberatkan masyarakat. Selain itu, permasalahan yang sering muncul dilapangan adalah petugas parkir liar yang melakukan pungutan tarif parkir yang tidak sesuai ketentuan. Sektor parkir memang sangat potensial untuk menjadi salah satu penyumbang Pendapatan Asli Daerah (PAD). Namun jika tidak dilakukan tata kelola yang baik, justru berpotensi menjadi penyimpangan dan memberatkan masyarakat. Hal ini berarti bahwa ada program yang tidak berjalan sesuai dengan perencanaan awal dan disinilah tugas besar Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Pekanbaru untuk memperjuangkan hal tersebut. Bentuk pengawasan yang dilakukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) adalah pengawasan politik, yaitu pengawasan yang dilakukan oleh lembaga legislatif Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) terhadap lembaga

eksekutif (Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah beserta perangkat daerah) yang lebih bersifat kebijakan strategis dan bukan pengawasan teknis maupun administratif, sebab Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) adalah lembaga politik seperti penggunaan anggaran yang telah dialokasikan disalah gunakan untuk hal-hal yang merugikan rakyat dan negara. Oleh karena itu tindak lanjut hasil pengawasan yang dilakukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Pekanbaru akan berujung pada dua aspek tersebut yang dapat berupa perbaikan regulasi yang ada maupun penyempurnaan kebijakan maupun penyempurnaan kebijakan yang telah dihasilkan dan pencegahan tindak penyelewengan wewenang yang dilakukan oleh aparaturnya pelaksana peraturan daerah. Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Robin Eduar, SE., MH selaku anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) kota Pekanbaru Komisi IV bahwa pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) terhadap sutaun Peraturan Daerah pada prinsipnya mengawasi pelaksana agar dilaksanakan sesuai tujuan awal peraturan daerah tersebut di usulkan. Terhadap Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 14 Tahun 2014 Tentang retribusi parkir di tepi jalan umum memang banyak keluhan masyarakat. Apalagi permasalahan parkir di Kota Pekanbaru masih permasalahan yang perlu mendapatkan perhatian serius. Baik dari tatanan regulasi dalam hal ini masih diatur melalui Perwako, tata kelola perparkiran, transparansi pendapatan dari sektor parkir, serta penertiban petugas parkir liar.³⁸ Selanjutnya wawancara dengan Bapak Robin Eduar, SE., MH menyinggung juga bahwa jika menemukan Kepala Dinas yang tidak sesuai atau melenceng dari prosedur dapat di berikan surat peringatan I hingga ke surat peringatan ke III yang dimana surat peringatan tersebut berupaya agar Kepala Dinas yang bersangkutan dapat berubah. Namun jika tidak adanya perubahan yang dilakukan oleh Kepala

³⁸ Wawancara dengan dengan Bapak Robin Eduar, SE., MH selaku anggota DPDR kota Pekanbaru Komisi IV

Dinas tersebut dapat dilakukan pemecatan hingga penurunan jabatan.³⁹

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pelaksanaan fungsi pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Pekanbaru Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 14 Tahun 2016 tentang Restribusi Parkir di Tepi Jalan Umum, pengawasan yang dijalankan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) belum/tidak dirasakan masyarakat sehingga timbul anggapan bahwa pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) kurang efektif dan tidak sesuai dengan harapan masyarakat terkait belum teratasinya permasalahan retribusi parkir dan pencapaian Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota Pekanbaru. Upaya meningkatkan fungsi pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Pekanbaru terhadap Pasal 18 Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 14 Tahun 2016 tentang Restribusi Parkir di Tepi Jalan Umum masih belum memberikan hasil yang maksimal. Belum ada upaya untuk meninjau dan mengevaluasi Peraturan Perparkiran di Kota Pekanbaru dan segera mengevaluasi tata kelola dan manajemen perparkiran di Kota Pekanbaru.

B. Saran

1. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Pekanbaru harus dapat memaknai secara benar fungsi dan tujuan pengawasan, sehingga dapat menjadi mekanisme check & balance yang efektif, melakukan optimalisasi pengawasan agar dapat memberikan pengaruh yang positif sesuai dengan yang diharapkan pada pengelolaan

pemerintahan daerah terkhusus masalah perparkiran di Kota Pekanbaru. Fungsi pengawasan perlu juga dilakukan adanya pengecekan ulang di lapangan agar mengetahui fakta sebenarnya yang terjadi dilapangan.

2. Seharusnya dengan telah dilakukannya upaya pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Pekanbaru dengan melakukan koordinasi dan rapat dengar serta melakukan pengawasan untuk segera meninjau dan mengevaluasi Peraturan Perparkiran di Kota Pekanbaru dan segera mengevaluasi tata kelola dan manajemen perparkiran di Kota Pekanbaru.

³⁹ Wawancara dengan dengan Bapak Robin Eduar, SE., MH selaku anggota DPDR kota Pekanbaru Komisi IV

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdullah, Rozali, Pelaksanaan 2007, Otonomi Luas Dengan Pemerintah Kepala Daerah Secara Langsung, Jakarta.
- Anwar, Saiful, 2005. Sendi-Sendi Hukum Administrasi Negara, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Angger Sigit Pramukti, 2018, Pengawasan Hukum Terhadap Aparatur Negara.
- Ashofa, Burhan, 2013, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Asshiddiqie, Jimly, 2011, Pengantar Hukum Tata Negara, Jakarta.
- Abdullah, Rozali, 2007, *Pelaksanaan Otonomi Luas Dengan Pemerintah Kepala Daerah Secara Langsung*, Jakarta.
- Abdi, Yuhana, 2013, Sistem Ketatanegaraan Indonesia Pasca Perubahan UUD 1945 Sistem Perwakilan Di Indonesia Dan Masa Depan MPR, (Bandung: Fokus Media, Jakarta.
- Barasa, Feriyanti, 2019, Strategi Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru Dalam Menertibkan Parkir Ilegal Di Kota Pekanbaru, *JOM FISIP* Vol. 6.
- Budiarjo, Miriam, 1996, Dasar-dasar Ilmu Politik, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- E, Utrecht, 1995, *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*, NV Bali Buku Indonesia, Jakarta.
- Gunawan, Markus, 2017, Buku Pintar Calon Anggota Legislatif (DPR, DPRD, dan DPD, Visimedia, Jakarta.
- Haris, Syamsuddin, 2005, Desentralisasi & otonomi Daerah, Jakarta.
- Husen, H.La Ode, 2005, Hubungan Fungsi Pengawasan DPR dengan Badan Pemeriksa Keuangan Dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Cv. Utomo: Bandung.
- Hadjon, Philipus M, *tentang wewenang*, Makalah pada peraturan Hukum Administrasi, Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Surabaya.
- H.D. Van Wijk/Willen Konjinenbelt, 2015, Jakarta.
- Hoofdstukken van Administratief Recht, Wilk, H.D., van, Uitgeverij Lemma BV
- HR, Ridwan, 2002, Hukum Administrasi Negara. UII Press, Yogyakarta.
- Huda, Ni'matul, 2005, *Pengantar Hukum Tata Negara*, Bumi Aksara, Jakarta.
- Indrohartono, 1993, Usaha Memahami Undang-undang Peradilan Tata Usaha Negara, Buku II, Beracara di Pengadilan Tata Usaha Negara, ' Sinar Harapan, Jakarta.
- Juhir, Jusuf, 2015, Aspek Hukum Pengawasan, Jakarta.
- Juanda, 2004, Hukum Pemerintahan Daerah: Pasang Surut Kewenangan antara DPRD dan Kepala Daerah, Penerbit P.T. Alumni, Bandung.
- Marbun, B.N, 1992, DPR: Pertumbuhan dan cara Kerjanya, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- M. Moeliono, Anton, 1995, Kamus Umum Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta.
- Markus, SH, Mkn, Gunawan, 2008, Buku Pintar Calon Anggota dan Anggota Legislatif (dpr, dpd & dprd), Trans Media, Jakarta.
- Mardiasmo, 2002, Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah, Yogyakarta.
- M. Situmorang, Viktor, Jusuf Juhir, Jakarta
- Prayudi, 1981, *Hukum Administrasi Negara*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Syafi' Ini Kencana, 1999, *Sistem Pemerintahan Indonesia*, Rineke Cipta, Jakarta.
- Sujanto, Ir, 1986, Beberapa Pengertian di Bidang Pengawasan, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Sahrir, *Pengamanan Dana dan Daya Negara*, Prisma.
- Sarundjang, 2012, Arus Balik Kekuasaan Pusat ke Daerah, Jakarta.
- Sunggono, Bambang, 2006, *Metode Penelitian Hukum*, PT. Rajawali Pers, Jakarta.
- Supriyadi, Deddy, 2004, Bratakusuh dan Dadang Solihin, Otonomi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Siagian, P, 2003 Teori dan Praktek Kepemimpinan, Rineka Cipta, Jakarta.
- Thaib, Dahlan, 1999, Teori dan Hukum Konstitusi, Rajawali pers, Bandung.

- Widjaja, HAW, 2005, Penyelenggaraan Otonomi di Indonesia, PT Raja Grafindo, Jakarta.
- William O. Sir Hart – J.F. Garner, 1994 Introduction To The Law of The Local Government and Administration, Butterworths, London, 1973, Hlm.297. Dikutip kembali oleh Bagir Manan dalam Hubungan Antara Pusat dan Daerah Menurut UUD 1945, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta.
- B. Jurnal/Skripsi/Kamus**
- Achmad, Ruslan, Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan Kualitas Produk Hukumnya, Jurnal Ilmu Hukum Amanna Gappa, 2012, Volume 13.
- Astawa, I Gde Panca, Jurnal Problematika Hukum Otonomi Daerah di Indonesia, Alumni, Bandung, 2008, hlm. 112.
- Budi, Susilo, Agus, “Makna dan Kriteria Diskresi Keputusan dan/atau Tindakan Pejabat Publik dalam Mewujudkan Tata Pemerintahan yang Baik”, Jurnal Hukum dan Peradilan, Vol. 4 No. 1, Maret 2015, hlm. 133-152.
- Dessy Artina, *Legal Standing* Lembaga Negara dalam Sengketa Antar Lembaga Negara yang Kewenangannya Diberikan Undang-Undang Dasar, Jurnal Konstitusi, Unri, Pekanbaru, 2012, hlm 82.
- Lawrance M. Friedman, 1984, *American Law: An introduction*, W.W Norton and Co, New Work.
- Githa Angela, Sihotang, et.al, 2017, “Diskresi Dan Tanggung Jawab Pejabat Publik Pada Pelaksanaan Tugas Dalam Situasi Darurat”, Jurnal Law Reform, Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Vol. 13, No. 1.
- Hadi, Syofyan , “Fungsi Legislasi Dalam Sistem Pemerintahan Presidensial (Studi Perbandingan Indonesia dan Amerika Serikat)”, Jurnal DIH, Jurnal Ilmu Hukum, 2013, Vol. 9, No. 1.
- Isnawati, perspektif hukum dalam pengawasan pengelolaan keuangan daerah, Jurnal Hukum, Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda, hlm 97.
- Julista, Mustamu, “Diskresi dan Tanggungjawab Administrasi Pemerintahan”, Jurnal Sasi, Vol. 17 No. 2, April-Juni 2011, hlm. 1-9.
- Mexasai Indra, “ Politik Hukum Pertanahan Sebelum dan Sesudah Berlakunya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960(1960),”Jurnal Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Riau, Edisi 1,No.1 Agustus 2010,hlm. 45.
- Faizal, Liky “Fungsi Pengawasan DPRD di Era Otonomi Daerah, “ *Jurnal TAPIS*, Vol. 7 No.13, Juli-Desember 2013, hlm. 6.
- Suaib, Pembentukan Dan Penataan Organisasi Perangkat Daerah, *Jurnal Katalogis*, Volume 5 Nomor 7, Juli 2017.
- Sutiyoso, Bambang Aspek-Aspek Perkembangan Kekuasaan Kehakiman di Indonesia, Jurnal UII Press, Yogyakarta, 2005, hlm. 18.
- Soedjito, Irawan, Pengawasan terhadap Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah. Jakarta: BinaAksara, 1983 hlm. 10-11.
- Ridwan HR, Hukum Administrasi Negara. UII Press, Yogyakarta,2002.
- Suseno, Agung, Eksistensi BPKP Dalam Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Bisnis & Birokrasi, Jurnal Ilmu Administrasi dan Organisasi, Jakarta.
- Manan, Bagir, 2005, Empat Tulisan tentang Hukum, Program Pascasarjana BKU Hukum Ketatanegaraan, Universitas Padjadjaran, Bandung, 1995, Hlm. 3. Dikutip kembali oleh Ni'matul Huda dalam Negara Hukum, Demokrasi dan Judicial Review, UII Press, Yogyakarta.
- Praptomo, 2016, Implementasi Fungsi Pengawasan DPRD Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati Di Kabupaten Kutai Ketatanegaraan, Jurnal, Magister Ilmu Hukum Universitas Brawijja.
- Puteri Hikmawati, 2016, Pidana Pengawasan sebagai Pengganti Pidana Bersyarat menuju Keadilan Restoratif, Jurnal DPR, Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI, Jakarta.
- C. Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945
Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah.
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD;
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Peraturan Perundangan;
Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 14 Tahun 2016 tentang Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum.

D. Website

<https://www.pekanbaru.go.id/p/news/realisasi-retribusi-parkir-capai-rp2-miliar>, diakses pada 02 Oktober 2021
[https://www.pekanbaru.go.id/p/news/realisasi-pad-parkir-capai-rp3 miliar](https://www.pekanbaru.go.id/p/news/realisasi-pad-parkir-capai-rp3-miliar), diakses pada 02 Oktober 2021
<https://dprd.pekanbaru.go.id/> diakses 12 November 2021
<https://www.idnjurnal.com/news/detail/6069/dishub-pekanbaru-kejar-targetpad-retribusi-parkir-begini-caranya>, diakses pada 02 Oktober 2021